

Pemerintah Kota
Pontianak



LAPORAN KINERJA

2025

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2025.

Penyusunan laporan ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini disusun sebagai media pertanggungjawaban yang memuat informasi tentang pencapaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak.

Kami menyadari bahwa dalam penulisan laporan ini masih banyak terdapat kekurangan, karena itu masukan dan saran dari semua pihak sangat kami harapkan. Kiranya laporan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Pontianak, Januari 2025

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PONTIANAK**



dr. Rifka, MM
Pembina Tingkat I
NIP 19740303 200212 2 006



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
 BAB I : PENDAHULUAN	 1
A. Gambaran Umum	1
B. Permasalahan Utama (Strategic Issued)	8
 BAB II : PERENCANAAN KINERJA	 10
A. Rencana Strategis	10
B. Perjanjian Kinerja	13
 BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	 17
A. Capaian Kinerja Organisasi	17
B. Realisasi Anggaran	57
 BAB IV : PENUTUP	 59
 LAMPIRAN : 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
2. Rencana Aksi 2025	
3. Renstra 2024 - 2026	

BAB I**PENDAHULUAN****A. GAMBARAN UMUM**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1), memiliki nomenklatur Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana (BP2KB), berdasarkan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak menyebabkan perubahan nomenklatur nama BP2KB menjadi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BPMPAKB), kemudian dengan masuknya Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada waktu itu BPMPAKB memiliki tiga urusan wajib yaitu Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak serta Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk.

Pada tahun 2017, sesuai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah nomenklatur BPMPAKB berubah menjadi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A), dengan kriteria tipologi A dan menjalankan urusan wajib Pemerintah non pelayanan dasar yaitu bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

1. Tupoksi

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak sesuai Peraturan Walikota Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota dan tugas pembantuan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Untuk melaksanakan

tugas pokok dimaksud Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
 1. Kepala Subbagian Umum Dan Aparatur; Dan
 2. Kepala Subbagian Perencanaan;
- c. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk;
- d. Kepala Bidang Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera;
- e. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat;

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat; Berikut tugas pokok dari masing-masing jabatan yang ada di DP2KBP3A Kota Pontianak :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan program kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu merumuskan kebijakan teknis,

penyelenggaraan pelayanan umum, pengendalian dan pembinaan teknis yang berada di bawahnya agar tugas berjalan efisien dan efektif.

b. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang kesekretariatan.

c. Kasubbag Umum dan Aparatur

Kepala Subbagian Umum dan Aparatur mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang umum dan kepegawaian.

d. Kasubbag Perencanaan

Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang perencanaan.

e. Kasubbag Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang Keuangan.

f. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di bidang Pengendalian Penduduk.

g. Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

h. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

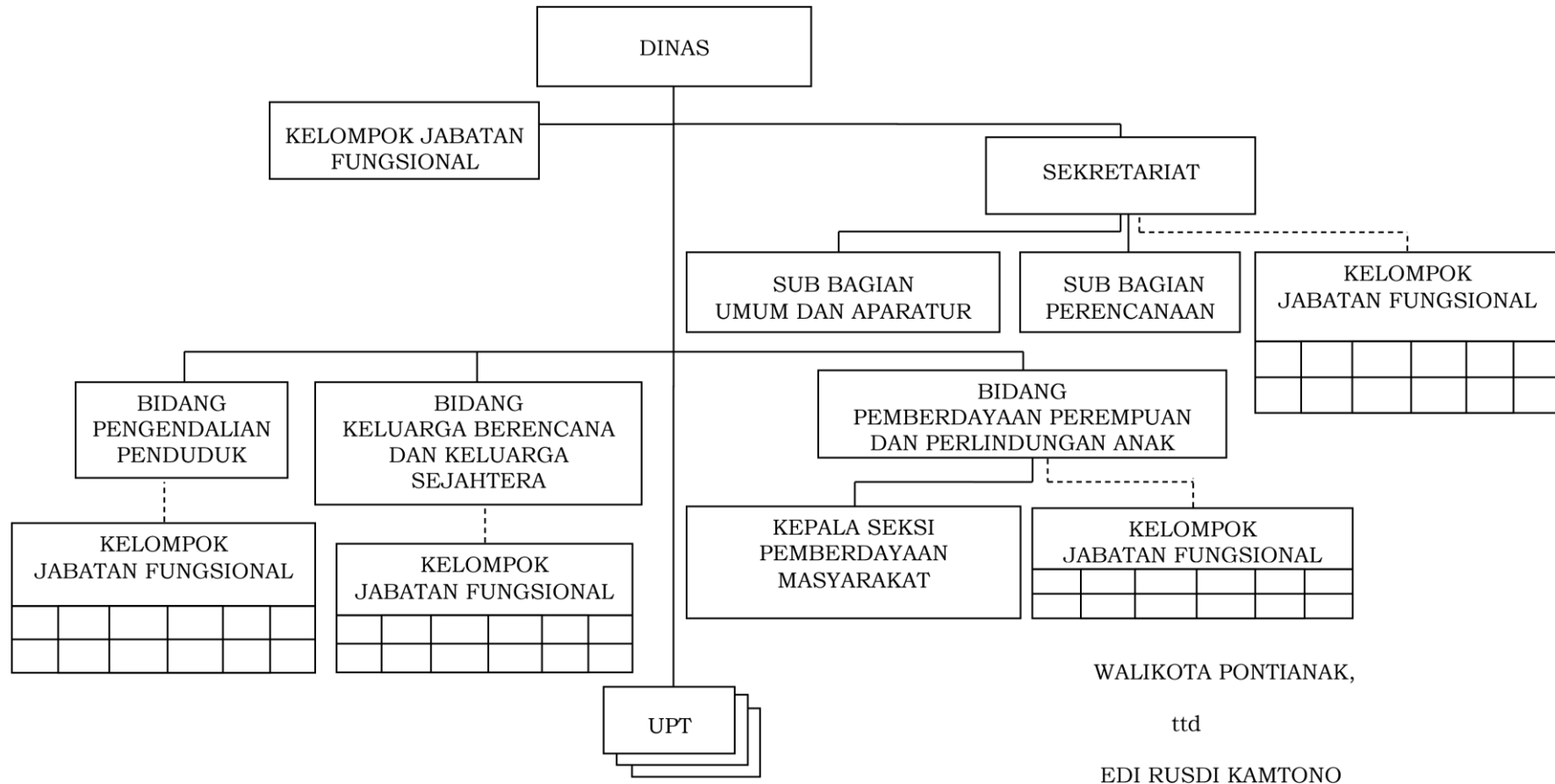
i. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam, mempunyai tugas pokok mengolah dan menyusun bahan

perumusan kebijakan teknis, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang pemberdayaan masyarakat.

Adapun bagan struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

**Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan KB,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak**



WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

3. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak memerlukan berbagai sumber daya sebagai berikut; Sampai dengan tahun 2025 jumlah pegawai DP2KBP3A Kota Pontianak berjumlah 42 orang yang terdiri dari 31 orang pegawai berstatus ASN dan 11 orang pegawai berstatus non ASN.

No	Jenjang Pendidikan	PNS		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Magister	2	3	4
2	Sarjana	2	17	19
3	Diploma 3	1	4	5
4	SMA	0	2	2
Jumlah		31		

Pegawai berpendidikan Strata 1 memiliki jumlah yang lebih banyak dibanding Pegawai dengan tingkat pendidikan lainnya yaitu sebanyak 23 Pegawai yang terdiri dari 21 orang ASN dan 1 orang pegawai non ASN, sedangkan Pegawai dengan tingkat Pendidikan D3 berjumlah 6 orang, semuanya berstatus ASN, Pegawai dengan tingkat Pendidikan Strata 2 berjumlah 5 orang, semuanya berstatus ASN dan pegawai dengan tingkat Pendidikan SMA berjumlah 12 orang, dengan rincian 1 orang berstatus ASN sedangkan 10 orang berstatus non ASN

4. Sarana dan Prasarana

Sarana Prasarana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak terdiri dari: Gedung kantor, rumah shelter, kendaraan roda empat sebanyak 4 unit, kendaraan roda dua sebanyak 54 unit dan sarana pendukung lainnya seperti yang terdapat dalam kartu inventaris barang.

5. Sumber Daya Keuangan

Dana yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas bersumber dari APBD Kota Pontianak. Penganggaran dana untuk kegiatan baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung yang merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak telah mengacu kepada Kepmendagri Nomor 13 tahun 2006 yaitu melalui Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK). Rencana Strategis dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran.

Sumber dana yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksana tugas Organisasi tahun 2025 bersumber dari APBD Kota Pontianak berupa Dokumen Anggaran 2025 Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp. 14.056.514.847,00 dengan perincian sebagai berikut :

**Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	2025%
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100
5	BELANJA DAERAH	14.056.514.847,00	12.555.868.204,00	89,32
5.1	BELANJA OPERASI	13.571.070.047,00	12.079.365.204,00	89,01
5.1.01	Belanja Pegawai	6.155.528.281,00	5.197.717.746,00	84,44
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.715.541.766,00	5.181.647.458,00	90,66
5.1.05	Belanja Hibah	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	100
	JUMLAH BELANJA OPERASI	13.571.070.047,00	12.079.365.204,00	89,01
5.2	BELANJA MODAL	485.444.800,00	476.503.000,00	98,16
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	193.852.800,00	186.876.000,00	96,4
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	291.592.000,00	289.627.000,00	99,33
	JUMLAH BELANJA MODAL	485.444.800,00	476.503.000,00	98,16
	JUMLAH BELANJA	14.056.514.847,00	12.555.868.204,00	89,32

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB), Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak di Kota Pontianak tahun 2025, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, total belanja OPD setelah perubahan menjadi Rp 14.056.514.847.

B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berhadapan

dengan permasalahan utama yang berasal dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal sebagai berikut :

a. Lingkungan Internal

- a) Sarana dan prasarana belum memadai.
- b) Pengelolaan dan pengembangan data belum optimal.
- c) Masih kurangnya tenaga teknis yang mempunyai keterampilan dan pengetahuan sesuai dengan bidangnya masing - masing.
- d) Jumlah personel yang belum memadai di bidang Pengendalian Penduduk dimana hanya tersedia 2 orang staf untuk membantu 2 kepala seksi.

b. Lingkungan Eksternal

- a) Masih adanya kematian Ibu Hamil muda.
- b) Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)
- c) Penjualan Anak (Trafficking)
- d) Rendahnya kesadaran masyarakat Kurang Mampu dalam melakukan Program KB.

Mengacu kepada Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola pemerintahan di daerah disertai dengan penyerahan keuangan untuk dapat melaksanakan kewenangannya. Sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan dalam penggunaan anggaran tersebut perlu disusun Laporan Kinerja seperti diatur dalam Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder*, sekaligus sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja agar terdapat upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah yang bersangkutan untuk memperbaiki kinerjanya di masa yang akan datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

B. REALISASI ANGGARAN

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN : 1. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2025

2. RENCANA AKSI

3. RENSTRA 2024-2026

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Perencanaan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2025 berkaitan erat dengan visi dan misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak yang tertuang dalam Rencana Strategis DP2KBP3A Kota Pontianak tahun 2024-2026 sebagai berikut:

1. Visi

Visi adalah pandangan jauh ke depan, terkait arah dan bagaimana instansi pemerintah akan dibawa dan berkarya agar tetap konsisten, antisipatif, inovatif, dan produktif. Visi ini merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, yang berisikan cita dan citra yang hendak diwujudkan oleh instansi pemerintah. Penetapan visi diperlukan untuk memadukan gerak langkah setiap unsur organisasi dan masyarakat untuk mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya yang ada, untuk menciptakan visi Kota Pontianak.

Berdasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, Tujuan dan Sasaran RPD Kota Pontianak Tahun 2024-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD Tahun 2005-2025. Visi pembangunan jangka panjang Kota Pontianak sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pontianak Tahun 2005-2025 adalah

“Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan Terdepan di Kalimantan Tahun 2025”.

2. Misi

Misi merupakan pernyataan apa yang harus dilakukan untuk mencapai visi di masa depan. Misi merupakan Langkah-langkah dan strategi yang diambil untuk mencapai tujuan jangka Panjang. Misi pembangunan jangka panjang Kota Pontianak sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pontianak Tahun 2005-2025 dijabarkan dalam lima misi pembangunan yakni sebagai berikut :

Misi Pertama	Mewujudkan masyarakat berwawasan kebangsaan yang sehat, cerdas, berbudaya dan berahlak mulia
Misi Kedua	Mewujudkan sarana, prasarana, tata ruang dan wilayah perkotaan untuk perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan
Misi Ketiga	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>), masyarakat yang paham politik, taat hukum, tentram dan tertib
Misi Keempat	Mewujudkan masyarakat madani, manusiawi, berkurangnya masalah sosial, makin berdaya dan terjamin hak-hak warga
Misi Kelima	Mewujudkan perekonomian yang stabil, tumbuh dan merata berbasis ekonomi kerakyatan

3. Tujuan dan Sasaran DP2KBP3A Kota Pontianak

Tujuan jangka panjang maupun jangka pendek (satu sampai dengan lima tahun) yang ingin dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak adalah sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh Pemerintah Kota Pontianak.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu. Adapun focus utama dari sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya baik manusia, prasarana dan sarana yang ada dalam melaksanakan kegiatan organisasi. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang, namun harus dapat dicapai serta berorientasi pada hasil.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak menetapkan sasaran serta indikator yang menjadi tolak ukur sebagai berikut :

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		1.1 Angka Stunting Balita
		a. Meningkatkan pendampingan Keluarga Beresiko Stunting oleh TPK	a.1 Cakupan Keluarga Beresiko Stunting yang Memperoleh Pendampingan
2	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk		2.1 Laju pertumbuhan Penduduk
		a. Menurunnya Angka Kelahiran Total	a.1 Angka kelahiran total (Total Fertility Rate /TFR) per WUS usia 15-49 Tahun
		b. Menurunnya kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi	b.1 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)
3	Meningkatnya Peran Perempuan dan Perlindungan Anak		3.1 Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak
			3.2 Tingkat Capaian Kota Layak Anak
		a. Meningkatkan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	a.1 Tingkat capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)
		b. Meningkatkan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	b.1 Rasio anak korban kekerasan
4	Menurunnya Kemiskinan		4.1 Tingkat Kemiskinan
		a. Meningkatkan Peran Lembaga Masyarakat dalam Pembangunan	a.1 Persentase keterlibatan lembaga Masyarakat dalam program pembangunan di wilayah kelurahan

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Pontianak dengan Wali Kota Pontianak merupakan komitmen formal dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah pada tahun berjalan. Pada tahap Perjanjian Kinerja sebelum anggaran perubahan, dokumen ini difokuskan pada penetapan **Sasaran Strategis** beserta **Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala OPD** sebagai tolok ukur utama keberhasilan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan DP2KBP3A.

Penetapan Kinerja, yang kemudian disebut sebagai Perjanjian Kinerja berdasarkan Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014, merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Menurut PermenPAN No. 53 Tahun 2014, perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini, terwujudlah komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumberdaya yang tersedia.

**Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak Tahun 2025**

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pendampingan Keluarga Beresiko Stunting oleh TPK	1	Cakupan Keluarga Beresiko Stunting yang Memperoleh Pendampingan	95,00%
2	Menurunnya Angka Kelahiran Total	2	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate /TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	2,10%
3	Menurunnya kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi	3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	8%
4	Meningkatnya Peran Serta dan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan	4	Tingkat capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Mentor
5	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	5	Rasio Anak korban kekerasan	0,02%
6	Meningkatnya Peran Lembaga Masyarakat dalam Pembangunan	6	Persentase keterlibatan lembaga Masyarakat dalam program pembangunan di wilayah kelurahan	85,00%

C. Perjanjian Kinerja Perubahan

Perjanjian Kinerja Perubahan antara Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Pontianak dengan Wali Kota Pontianak merupakan penyesuaian komitmen kinerja yang tidak hanya memuat Sasaran Strategis dan IKU Kepala OPD, tetapi juga telah mengintegrasikan **IKU Wali Kota** yang menjadi **indikator tujuan perangkat daerah**. Dengan demikian, dokumen ini menunjukkan keterkaitan yang lebih kuat antara kinerja DP2KBP3A dengan pencapaian tujuan pembangunan Kota Pontianak secara makro.

**Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak Tahun 2025**

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1.1	Angka Stunting Balita	13,00%
a.	Meningkatnya pendampingan Keluarga Beresiko Stunting oleh TPK	a.1	Cakupan Keluarga Beresiko Stunting yang Memperoleh Pendampingan	92,00%
2.	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	2.1	Laju pertumbuhan Penduduk	0,93%
a.	Menurunnya Angka Kelahiran Total	a.1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate /TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	2,22%
b.	Menurunnya kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi	b.1	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	8,8%
3.	Meningkatnya Peran Perempuan dan Perlindungan Anak	3.1	Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak	94,3%
		3.2	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Nindya
a.	Meningkatnya Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	a.1	Tingkat capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Utama
b.	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	b.1	Rasio Anak korban kekerasan	0,04%
4.	Menurunnya Kemiskinan	4.1	Tingkat Kemiskinan	4,2 - 4,3
a.	Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan dalam Pembangunan	a.1	Persentase keterlibatan lembaga Kemasyarakatan dalam program pembangunan di wilayah kelurahan	80,00%

Pada Perjanjian Kinerja Perubahan ini, tujuan pertama yang menjadi perhatian adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, yang diukur melalui indikator angka stunting balita sebesar 13,00%. Dalam mendukung tujuan tersebut, DP2KBP3A menetapkan sasaran strategis berupa meningkatnya pendampingan keluarga berisiko

stunting oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) dengan target cakupan pendampingan sebesar 92,00%.

Tujuan kedua adalah terkendalinya pertumbuhan penduduk, yang diukur melalui laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,93%. Sasaran strategis yang mendukung tujuan ini meliputi penurunan angka kelahiran total (TFR) menjadi 2,22 serta penurunan unmet need menjadi 8,8%.

Selanjutnya, pada tujuan meningkatnya peran perempuan dan perlindungan anak, indikator yang digunakan adalah Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak sebesar 94,3% dan capaian Kota Layak Anak pada kategori Nindya. Sasaran strategis yang ditetapkan untuk mendukung tujuan ini adalah peningkatan peran serta dan kesetaraan gender melalui capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kategori Utama, serta peningkatan perlindungan perempuan dan anak yang diukur dengan rasio anak korban kekerasan sebesar 0,04%.

Tujuan berikutnya adalah menurunnya tingkat kemiskinan pada rentang 4,2–4,3%, yang didukung oleh sasaran strategis berupa meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan, dengan target keterlibatan sebesar 80,00% di wilayah kelurahan.

Dengan dimasukkannya indikator tujuan yang merupakan IKU Wali Kota, Perjanjian Kinerja Perubahan ini menunjukkan adanya *cascading kinerja* yang lebih utuh dari level kepala daerah hingga kepala perangkat daerah. Hal ini menegaskan bahwa kinerja DP2KBP3A tidak hanya diukur dari keberhasilan program internal, tetapi juga dari kontribusinya secara langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan Kota Pontianak secara keseluruhan, sehingga akuntabilitas kinerja menjadi lebih terintegrasi, terarah, dan terukur.

BAB III**AKUNTABILITAS KINERJA****A. Capaian Kinerja Organisasi**

Berdasarkan kontrak kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2025, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Pontianak berkewajiban untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada stakeholders atas penggunaan anggaran negara.

Untuk mengetahui tingkat ketercapaian baik keberhasilan / kegagalan dari setiap target kinerja yang ditetapkan serta sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan analisis capaian kinerja. Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk Akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Hal terpenting yang diperlukan Dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Capaian kinerja yang ingin diketahui melalui pengukuran kinerja ini adalah adanya kesinambungan atau sinergi antara visi-misi-tujuan dan sasaran strategis dengan menggunakan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui capaian kinerja tersebut, dokumen dan data kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pengukuran kinerja adalah :

1. Dokumen Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (**Lampiran**);
2. Dokumen rencana kegiatan atau Rencana Aksi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 (**Lampiran**);
3. Dokumen penetapan kinerja (TAPKIN), sebagaimana termuat pada Penetapan Kinerja Tahun 2025 (**Lampiran**);
4. Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) beserta laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi penggunaan anggaran Tahun 2025.

Dalam laporan akuntabilitas ini, pengukuran capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak mencakup 7(tujuh) unsur utama, yaitu :

1. Pengukuran kinerja sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil (outcome), dengan cara membandingkan antara Target outcome yang ditetapkan dari masing-masing Indikator kinerja sasaran dengan Realisasi dari sasaran yang dicapai.
2. Pengukuran kinerja sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil (outcome), dengan cara membandingkan antara Realisasi kinerja sasaran serta Capaian kinerja sasaran Tahun 2024 dengan beberapa tahun terakhir.
3. Pengukuran kinerja sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil (outcome), dengan cara membandingkan Realisasi kinerja sasaran dan Target Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Restra/ RPJMD.
4. Pengukuran kinerja sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil (outcome), dengan cara membandingkan Realisasi kinerja sasaran Tahun 2024 dengan Standar Nasional
5. Pengukuran kinerja sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil (outcome), dengan cara menganalisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak.
6. Pengukuran kinerja sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil (outcome), dengan cara menganalisis atas efesiensi penggunaan Sumber Daya.
7. Pengukuran kinerja kegiatan dan sub kegiatan, yang diarahkan pada pengukuran kinerja keluaran (output), dengan cara menganalisis Program/ kegiatan/ sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan kinerja.

Analisis terhadap capaian kinerja sasaran dan kegiatan dalam laporan akuntabilitas kinerja ini menggunakan metode pengukuran sebagai berikut :

1. Metode Perbandingan Rencana dan Realisasi

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing - masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Interval	Kategori
> 85	= Sangat Berhasil
70 < X ≤ 85	= Berhasil
55 < X ≤ 70	= Cukup Berhasil
≤ 55	= Tidak Berhasil

Untuk capaian masing - masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan "**Metode Rata - Rata Data Kelompok**". Penyimpulan capaian sasaran dengan "**Metode Rata- Rata Data Kelompok**" adalah penyimpulan pada tingkat sasaran yang dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata - rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

$$\text{Capaian Sasaran} = \frac{\text{Jumlah Indikator untuk Setiap Kategori} \times \text{Nilai Mean Setiap Kegiatan}}{\text{Jumlah Indikator Kinerja Sasaran}}$$

Nilai mean setiap kategori adalah sebagai berikut :

Nilai Mean (x)	Kategori
92,5	= Sangat Berhasil
77,5	= Berhasil
62,5	= Cukup Berhasil
27,5	= Tidak Berhasil

Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan kategori **sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil** dan **tidak berhasil**.

Evaluasi dan analisa capaian kinerja ditujukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan serta hambatan kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah - langkah pemecahan masalah yang diambil Instansi Pemerintah Kota Pontianak dalam rangka memenuhi target kinerja dari masing - masing indikator kinerja sasaran (*outcome*) dan indikator kinerja kegiatan (*output*) yang ingin dicapai dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025. Selain itu disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai input bagi proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan pendekatan diatas, tingkat Pencapaian indikator sasaran DP2KBP3A Kota Pontianak Tahun 2025 dapat dilihat pada matrik sebagai berikut :

Tabel. III.1
Capaian Indikator Sasaran Strategis DP2KBP3A Kota Pontianak
Tahun 2025

Indikator Tujuan dan Sasaran Strategis	Nilai Capaian	Skala Pengukuran Ordinal			
		X > 85	70 < X ≤ 85	55 < X ≤ 70	X ≤ 55
Tujuan 1. PD :					
Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk					
Laju pertumbuhan penduduk	-13,05%				
Tujuan 2. PD :					
Meningkatnya Peran Perempuan dan Perlindungan Anak					
Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak	100,53%				
Tingkat Capaian Kota Layak Anak	100%				
Sasaran 1: Meningkatkan pendampingan Keluarga Beresiko Stunting oleh TPK					
Cakupan Keluarga Beresiko Stunting yang Memperoleh Pendampingan	85,30%				
Sasaran 2 : Menurunnya Angka Kelahiran Total					
Angka kelahiran total (Total Fertility Rate /TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	100%				
Sasaran 3 : Menurunnya kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi					
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	152,61%				
Sasaran 4 : Meningkatkan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan					
Tingkat capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	100%				
Sasaran 5 : Meningkatkan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak					
Rasio anak korban kekerasan	150%				
Sasaran 6 : Meningkatkan Peran Lembaga Kemasyarakatan dalam Pembangunan					
Persentase keterlibatan lembaga Kemasyarakatan dalam program pembangunan di wilayah kelurahan	100%				
Jumlah Keseluruhan Capaian	97,26				

Dari tabel diatas dapat terlihat Secara keseluruhan, capaian perangkat daerah mencapai **97,26%**, yang menunjukkan kinerja yang cukup baik. Meskipun ada beberapa area yang masih memerlukan perhatian lebih, capaian ini menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis. Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan pendekatan di atas, tingkat pencapaian kinerja Tujuan Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. TUJUAN

- TUJUAN 1 : “Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk”
- TUJUAN 2 : “Meningkatnya Peran Perempuan dan Perlindungan Anak”
- OPD PENGAMPU : Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Laju pertumbuhan Penduduk	0,93%	1,06%
2	Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak	94,3%	94,80%
3	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Nindya	Nindya

Sumber : BPS & DP2KBP3A Kota Pontianak 2024

Adapun Pengukuran Indikator Kinerja Utama pada Tujuan DP2KBP3A Kota Pontianak, dapat dilakukan dengan beberapa hal sebagai berikut :

1. Membandingkan antara Target dan Realisasi

Tabel. III.2
Capaian Tujuan Strategis Pemerintah Kota Pontianak dengan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

No	Tujuan	IKU	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	Laju pertumbuhan Penduduk	0,93%	1,06%	-13,05%
2	Meningkatnya Peran Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak	94,3%	94,80%	100,53%
		Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Nindya	Nindya	100%

Sumber : BPS DP2KBP3A Kota Pontianak 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Tujuan **Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk** dengan indikator kinerja utama yaitu : “**Laju Pertumbuhan Penduduk**” dengan target 0,93% “**tidak berhasil**” dicapai dengan realisasi diatas yang telah ditargetkan yaitu 1,06%. Capaian Indikator Kinerja Utama dikatakan “**Berhasil**” jika Realisasi lebih kecil atau sama dengan Target, dan sebaliknya Capaian Indikator Kinerja Utama dikatakan “**Tidak Berhasil**” jika Realisasi lebih besar dari Target.

Sementara itu, untuk Tujuan **Meningkatnya Peran Perempuan dan Perlindungan Anak** diukur dengan dua indikator. Pertama : “Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak” dengan target 94,3% “**berhasil**” dicapai dengan realisasi

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak

diatas yang telah ditargetkan yaitu **94,80%**, sedangkan Indikator kedua ; Tingkat Capaian Kota Layak Anak **“berhasil”** dicapai dengan realisasi kategori Nindya sama dengan target yang telah ditetapkan yaitu **kategori Nindya**. Capaian Indikator Kinerja Utama dikatakan **“Berhasil”** jika Realisasi lebih besar atau sama dengan Target, dan sebaliknya Capaian Indikator Kinerja Utama dikatakan **“Tidak Berhasil”** jika Realisasi lebih kecil dari Target.

Data merupakan capaian IKU masih menggunakan data tahun 2024, data capaian Tahun 2025 belum tersedia.

2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan beberapa Tahun terakhir

Evaluasi dan Analisis terhadap Capaian Kinerja Indikator Tujuan DP2KBP3A Kota Pontianak Tahun 2025, juga dapat dilihat dari perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan beberapa Tahun terakhir yaitu Realisasi Indikator Kinerja Utama pada Tahun 2024 dan di Tahun 2023. Berikut Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya, sebagai berikut :

Tabel III.3
Tabel Perbandingan Realisasi Serta Capaian Indikator Kinerja Tujuan di Tahun 2025 dengan Beberapa Tahun Sebelumnya

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2025	Realisasi		
				2023	2024	2025
1	Terkendalnya Pertumbuhan Penduduk	Laju pertumbuhan Penduduk	0,93%	0,92%	1,06%	1,06%
2	Meningkatnya Peran Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak	94,3%	94,65%	94,80%	94,80%
		Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya

Sumber : BPS DP2KBP3A Kota Pontianak 2024

Pada Tahun 2023, LPP Kota Pontianak berada pada angka 0,92%. Pada Tahun 2024 terjadi kenaikan menjadi 1,06% dan pada Tahun 2025 masih menggunakan angka yang sama karena ketersediaan data resmi. Secara tren, terjadi kenaikan LPP dari Tahun 2023 ke Tahun 2024. Namun demikian, angka 1,06% secara substansi kependudukan berada pada kategori pertumbuhan penduduk yang seimbang (balanced growth). Dengan demikian, meskipun secara perbandingan terhadap target 0,93% terlihat lebih tinggi, kondisi LPP Kota Pontianak tetap mencerminkan pertumbuhan penduduk yang terkendali dan stabil dari sisi kualitas demografi.

IPG Kota Pontianak menunjukkan tren peningkatan konsisten dari Tahun 2023 ke Tahun 2024. Pada Tahun 2025, nilai yang digunakan masih sama karena

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak

menunggu rilis data terbaru. Kenaikan ini menunjukkan semakin kecilnya kesenjangan capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan, serta efektivitas program pemberdayaan perempuan yang dilaksanakan secara lintas sektor.

Predikat Kota Layak Anak kategori Nindya berhasil dipertahankan selama tiga tahun berturut-turut. Hal ini menunjukkan konsistensi kebijakan, kelembagaan, program, serta dukungan lintas sektor dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kota Pontianak.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah Renstra

Tabel III.4 menyajikan perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target Tahun 2025 serta target jangka menengah Renstra.

Tabel. III.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan
Target Tahun 2025 dan Target Jangka Menengah Renstra

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2025	Realisasi 2025	Target RENSTRA	%
1	Terkendalnya Pertumbuhan Penduduk	Laju pertumbuhan Penduduk	0,93%	1,06%	0,92	-14,30%
2	Meningkatnya Peran Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak	94,3%	94,80%	94,30	100,53%
		Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Nindya	Nindya	Utama	75%

Sumber : BPS DP2KBP3A Kota Pontianak 2024

Secara perbandingan angka, realisasi Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2025 berada di atas target tahunan dan target jangka menengah Renstra. Hal ini menyebabkan capaian indikator secara perhitungan kinerja tercatat belum memenuhi target yang ditetapkan.

Namun demikian, secara substansi kependudukan, realisasi Laju Pertumbuhan Penduduk sebesar 1,06% mencerminkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan terkendali. Laju pertumbuhan pada kisaran 1% merupakan kondisi ideal dalam pengendalian penduduk karena menjaga keseimbangan struktur umur penduduk, mendukung bonus demografi, serta menghindari risiko pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat maupun penurunan fertilitas ekstrem.

Realisasi IPG yang melampaui target tahunan dan target Renstra menunjukkan bahwa upaya pengurangan kesenjangan pembangunan antara laki-

laki dan perempuan berjalan efektif. Capaian ini mencerminkan peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi serta meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah.

Untuk kepentingan pengukuran kinerja, tingkat capaian KLA dikonversi menjadi nilai numerik dengan ketentuan: Pratama = 1, Madya = 2, Nindya = 3, Utama = 4 dan Kota Layak Anak = 5. Berdasarkan konversi tersebut, realisasi KLA pada kategori Nindya (nilai 3) dibandingkan dengan target Renstra Utama (nilai 4) menghasilkan capaian sebesar 75%. Capaian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Pontianak telah berjalan baik dan konsisten, namun masih memerlukan penguatan pada beberapa klaster dan indikator pendukung agar dapat mencapai kategori Utama sesuai target jangka menengah Renstra.

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional

Tabel. III.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Nasional

No	Tujuan	IKU	Target 2025	Realisasi 2025	Standar Nasional
1	Terkendalnya Pertumbuhan Penduduk	Laju pertumbuhan Penduduk	0,93%	1,06%	0,95%
2	Meningkatnya Peran Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak	94,3%	94,80%	91,39
		Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Nindya	Nindya	-

Sumber : BPS DP2KBP3A Kota Pontianak 2024

Berdasarkan tabel III.5 diatas, Untuk Indikator Laju Pertumbuhan Penduduk, standar nasional sebesar 0,95% digunakan sebagai tolok ukur pencapaian pengendalian kependudukan yang sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional. Pencapaian realisasi Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pontianak sebesar 1,06% pada tahun 2025 berada di atas standar nasional, namun secara demografis masih menunjukkan pertumbuhan penduduk yang moderat dan relatif terkendali dalam jangka menengah.

Untuk Indeks Pembangunan Gender, standar nasional sebesar 91,39% menunjukkan rata-rata capaian nasional dalam kesetaraan gender. Realisasi IPG Kota Pontianak (94,80%) melampaui standar nasional, mengindikasikan keberhasilan daerah dalam mengurangi kesenjangan gender. Sementara itu, standar nasional untuk Kota Layak Anak tidak tersedia, sehingga capaian KLA Kota Pontianak dinilai berdasarkan target internal daerah dan kategori yang ditetapkan.

5. Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.

Berikut analisis mengenai penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian indikator angka stunting balita pada tahun 2025:

Tabel. III.6
Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi yang Dilakukan	Rekomendasi/ Rencana Tindak Lanjut
1	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	Laju pertumbuhan Penduduk	a) Faktor Sosial dan Budaya b) Kendala Ekonomi c) Keterbatasan Sumber Daya dan Infrastruktur	a) Meningkatkan efektivitas Program Keluarga Berencana (KB) b) Peningkatan Kesadaran Masyarakat c) Meningkatkan Sinergi dan Kolaborasi Antar Instansi	a) Melakukan Pendekatan Sosial dan Budaya yang Inovatif b) Melakukan Peningkatan Kolaborasi Antar Sektor c) Melakukan Peningkatan Akses dan Edukasi di Wilayah Pinggiran Kota d) Melakukan Penguatan Monitoring dan Evaluasi
2	Meningkatnya Peran Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak	a) Adanya Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) b) Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah c) Adanya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah d) Tingginya partisipasi perempuan dalam sektor ekonomi dan politik e) Meningkatnya akses perempuan terhadap layanan pendidikan dan kesehatan		a) Meningkatkan keterlibatan sektor swasta dalam mendukung program pemberdayaan perempuan b) Memperkuat regulasi dan kebijakan yang lebih spesifik c) Menyediakan lebih banyak fasilitas ramah perempuan
		Tingkat Capaian Kota Layak Anak	a) Adanya kebijakan perlindungan anak melalui regulasi daerah b) Tersedianya fasilitas publik yang lebih ramah anak c) Terlaksananya Kolaborasi dengan berbagai pihak d) Adanya program edukasi dan		a) Penguatan sistem perlindungan anak berbasis komunitas b) Peningkatan layanan rehabilitasi dan pemulihan bagi anak korban kekerasan c) Meningkatkan keterlibatan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi yang Dilakukan	Rekomendasi/ Rencana Tindak Lanjut
			kampanye kesadaran hak anak		dunia usaha dalam penyediaan fasilitas dan kebijakan yang mendukung kesejahteraan anak

Sumber : DP2KBP3A Kota Pontianak 2024

Penjelasan untuk Tujuan Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk. Berdasarkan data pencapaian laju pertumbuhan penduduk Kota Pontianak tahun 2025 (menggunakan data capaian 2024) yang tercatat sebesar 1,06%, lebih baik dibandingkan target 0,93%.

1) Penyebab Kegagalan atau Hambatan:

a) Faktor Sosial dan Budaya:

- Norma budaya masyarakat yang masih memandang banyak anak sebagai simbol kesejahteraan dan jaminan masa tua menyebabkan preferensi jumlah anak relatif tinggi.

b) Kendala Ekonomi:

- Sebagian masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah cenderung kurang peduli terhadap perencanaan keluarga karena prioritas mereka lebih pada pemenuhan kebutuhan ekonomi harian.

c) Keterbatasan Sumber Daya dan Infrastruktur:

- Keterbatasan jumlah tenaga penyuluh lapangan yang kurang merata di beberapa wilayah.

2) Alternatif Solusi yang dilakukan:

a) Efektivitas Program Keluarga Berencana (KB):

- Program KB yang berjalan dengan baik, seperti penyediaan pelayanan KB Jangka Panjang gratis, layanan antar jemput akseptor dan pemberian uang pengganti tidak bekerja untuk akseptor yang menerima pelayanan KB.
- Dukungan dari tenaga kesehatan dan kader KB di tingkat kelurahan yang aktif melakukan pendampingan masyarakat dan pelayan KB, melalui kegiatan bakti social pelayanan KB.

b) Peningkatan Kesadaran Masyarakat:

- Edukasi berkelanjutan mengenai manfaat keluarga kecil dan perencanaan yang baik melalui Promosi dan KIE Program Bangga

Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang.

- Peran aktif tokoh masyarakat dan agama dalam menyosialisasikan program pengendalian penduduk melalui Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja.

c) Sinergi dan Kolaborasi Antar Instansi:

- Koordinasi yang baik antara Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB), Dinas Kesehatan, dan instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan program pengendalian penduduk.

3) Rekomendasi Perbaikan:

Untuk mempertahankan tren positif dan mengatasi hambatan yang ada, berikut beberapa rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan:

a) Meningkatkan Akses dan Edukasi di Wilayah Pinggiran Kota:

- Memperluas jangkauan edukasi KB ke daerah pinggiran melalui mobil pelayanan KB, media sosial, dan kerja sama dengan komunitas lokal.
- Melibatkan lebih banyak kader masyarakat untuk melakukan penyuluhan berbasis budaya lokal agar lebih mudah diterima.

b) Pendekatan Sosial dan Budaya yang Inovatif:

- Mengajak tokoh adat, agama, dan pemuka masyarakat untuk menyampaikan pentingnya pengendalian jumlah anak sesuai dengan konteks budaya lokal.
- Menyediakan program edukasi keluarga yang lebih berorientasi pada kesejahteraan dan kualitas hidup.

c) Peningkatan Kolaborasi Antar Sektor:

- Memperkuat kerja sama antara sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi dalam rangka integrasi program pengendalian penduduk dengan kesejahteraan keluarga.
- Mengoptimalkan pemanfaatan dana CSR (Corporate Social Responsibility) dari perusahaan swasta untuk mendukung program edukasi dan layanan kesehatan reproduksi.

d) Penguatan Monitoring dan Evaluasi:

- Mengembangkan sistem pemantauan berbasis data real-time untuk memantau laju pertumbuhan penduduk secara berkala dan mengambil langkah cepat jika terjadi peningkatan di luar perkiraan.

- Melakukan evaluasi tahunan untuk mengidentifikasi keberhasilan dan kendala dalam program pengendalian penduduk serta melakukan perbaikan berkelanjutan.

Tujuan Meningkatnya Peran Perempuan dan Perlindungan Anak. Berdasarkan data pencapaian Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak tahun 2025 (menggunakan data capaian 2024) yang tercatat sebesar 94,80%, lebih baik dibandingkan target 94,30%. Pencapaian indikator Tingkat Capaian Kota Layak Anak dengan kategori Nindya, sama dengan target yang ditetapkan. Penjelasan dan Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan sebagai berikut :

1) Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Pontianak

a) Penyebab Keberhasilan/Peningkatan:

- Adanya Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG), Peraturan Wali Kota (Perwa) Pontianak Nomor 19 Tahun 2019 mengatur tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kota Pontianak, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, kelembagaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan. Kebijakan ini didukung oleh Peraturan Daerah (Perda) Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2022
- Peningkatan akses perempuan terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, yang mendorong peningkatan kesejahteraan perempuan.
- Dukungan pemerintah daerah dalam pemberdayaan perempuan melalui program pelatihan keterampilan, UMKM berbasis perempuan, dan akses ke permodalan.
- Tingginya partisipasi perempuan dalam sektor ekonomi dan politik, seperti meningkatnya jumlah wirausaha perempuan dan keterlibatan mereka dalam pemerintahan.
- Adanya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender.

b) Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut:

- Meningkatkan keterlibatan sektor swasta dalam mendukung program pemberdayaan perempuan.
- Memperkuat regulasi dan kebijakan yang lebih spesifik untuk mengurangi ketimpangan gender di dunia kerja dan sektor lainnya.

- Menyediakan lebih banyak fasilitas ramah perempuan, seperti tempat penitipan anak di tempat kerja dan transportasi umum yang aman bagi perempuan.

2) Tingkat Capaian Kota Layak Anak (KLA) Kota Pontianak

a) Penyebab Keberhasilan/Peningkatan:

- Penguatan kebijakan perlindungan anak melalui regulasi daerah antara lain; Perda Kota Pontianak Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Perda ini menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam melindungi serta memenuhi hak anak. Perda Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2022: Mengatur tentang Kota Layak Anak (KLA), termasuk monitoring dan evaluasi indikator KLA secara berkala. Perwa Nomor 22 Tahun 2025: Mengatur tentang Pembatasan Jam Malam Anak (pukul 22.00 - 04.00 WIB) untuk mencegah kekerasan dan menciptakan lingkungan aman bagi anak di bawah 18 tahun.
- Tersedianya fasilitas publik yang lebih ramah anak, seperti ruang bermain anak, sekolah inklusif, dan pusat layanan anak yang lebih baik.
- Kolaborasi dengan berbagai pihak seperti dunia usaha dan LSM dalam penyediaan layanan bagi anak-anak.
- Adanya program edukasi dan kampanye kesadaran hak anak, yang meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak.

b) Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut:

- Penguatan sistem perlindungan anak berbasis komunitas, dengan mendorong peran aktif RT/RW, sekolah, dan kelompok masyarakat dalam mendeteksi serta mencegah kekerasan terhadap anak.
- Meningkatkan keterlibatan dunia usaha dalam penyediaan fasilitas dan kebijakan yang mendukung kesejahteraan anak dan keluarga pekerja.
- Peningkatan layanan rehabilitasi dan pemulihan bagi anak korban kekerasan, serta penyediaan program pencegahan kekerasan terhadap anak yang lebih komprehensif dengan mendorong percepatan pembentukan UPTD PPA Kota Pontianak.

Dari tabel III.1 diatas dapat terlihat Secara keseluruhan, capaian perangkat daerah mencapai **97,76%**, yang menunjukkan kinerja yang cukup baik. Meskipun ada beberapa area yang masih memerlukan perhatian lebih, capaian ini menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis. Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan pendekatan di atas, tingkat pencapaian kinerja sasaran DP2KBP3A Pontianak Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

2. SASARAN

- Sasaran 1 : Meningkatnya pendampingan Keluarga Beresiko Stunting oleh TPK
- Sasaran 2 : Menurunnya Angka Kelahiran Total
- Sasaran 3 : Menurunnya kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi
- Sasaran 4 : Meningkatnya Peran Serta dan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan
- Sasaran 5 : Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak
- Sasaran 6 : Meningkatnya Peran Lembaga Masyarakat dalam Pembangunan
- OPD PENGAMPU : Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	INDIKATOR SASARAN	TARGET	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Cakupan Keluarga Beresiko Stunting yang Memperoleh Pendampingan	92,00%	85,30%
2	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate /TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	2,22%	109,46%
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	8,8%	152,61%
4	Tingkat capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Utama	Utama
5	Rasio Anak korban kekerasan	0,04%	150%
6	Persentase keterlibatan lembaga Masyarakat dalam program pembangunan di wilayah kelurahan	80%	100%

Adapun Pengukuran Indikator Kinerja Utama pada Sasaran DP2KBP3A Kota Pontianak, dapat dilakukan dengan beberapa hal sebagai berikut :

1. Membandingkan antara Target dan Realisasi

Tabel. III.2
Capaian Sasaran Strategis DP2KBP3A Kota Pontianak dengan
Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2025

No (1)	Sasaran (2)	Indikator Sasaran (3)	Target (4)	Realisasi (5)	% (6)
1	Meningkatnya pendampingan Keluarga Beresiko Stunting oleh TPK	Cakupan Keluarga Beresiko Stunting yang Memperoleh Pendampingan	92,00%	78,48%	85,30%
2	Menurunnya Angka Kelahiran Total Menurunnya kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate /TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	2,22%	2,2%	100%
3	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	8,8%	4,17%	152,61%
4	Meningkatnya Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Tingkat capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Utama	Utama	Utama
5	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	Rasio Anak korban kekerasan	0,04%	0,02%	150%
6	Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan dalam Pembangunan	Persentase keterlibatan lembaga Kemasyarakatan dalam program pembangunan di wilayah kelurahan	80%	80%	100%

Sumber : BPS DP2KBP3A Kota Pontianak 2024

Berdasarkan hasil pengukuran capaian sasaran strategis DP2KBP3A Kota Pontianak Tahun 2025, secara umum kinerja perangkat daerah menunjukkan hasil baik hingga sangat baik, dimana sebagian besar indikator telah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan. Namun demikian masih terdapat satu indikator yang belum mencapai target optimal sehingga memerlukan penguatan strategi pelaksanaan program.

Sasaran meningkatnya pendampingan keluarga berisiko stunting oleh Tim Pendamping Keluarga menunjukkan capaian sebesar 78,48% dari target 92,00% atau 85,30%. Capaian ini belum memenuhi target yang ditetapkan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh mobilitas keluarga sasaran, keterbatasan waktu kunjungan lapangan, serta belum meratanya pemutakhiran data keluarga berisiko stunting. Meskipun demikian kegiatan pendampingan tetap berjalan melalui edukasi gizi, pemantauan ibu hamil, dan konseling keluarga sehingga program telah berjalan cukup efektif namun masih memerlukan peningkatan intensitas kunjungan serta validasi data sasaran.

Sasaran menurunnya angka kelahiran total menunjukkan hasil sangat baik dengan capaian sebesar 2,01 dari target 2,22 atau 109,46%. Hal ini menggambarkan keberhasilan program pengendalian penduduk melalui peningkatan akses pelayanan kontrasepsi, konseling keluarga berencana, serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam perencanaan jumlah anak. Penurunan

rata-rata jumlah kelahiran per perempuan usia subur menandakan stabilisasi pertumbuhan penduduk mulai terbentuk.

Sasaran menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi juga menunjukkan kinerja sangat baik dengan capaian 4,17% dari target 8,8% atau 152,61%. Capaian ini menunjukkan masyarakat yang membutuhkan kontrasepsi telah semakin terlayani melalui fasilitas kesehatan, pelayanan KB keliling, serta kegiatan edukasi kesehatan reproduksi sehingga hambatan akses pelayanan semakin berkurang.

Sasaran meningkatnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan berhasil dipertahankan pada kategori Utama dalam penilaian Anugerah Parahita Ekapraya sesuai target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan pengarusutamaan gender telah terintegrasi dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah serta dilaksanakan secara konsisten oleh perangkat daerah.

Pada sasaran meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak, rasio anak korban kekerasan berhasil ditekan menjadi 0,02% dari target 0,04% atau mencapai 150%. Penurunan ini menunjukkan efektivitas upaya pencegahan, edukasi masyarakat, serta peningkatan koordinasi layanan perlindungan anak sehingga penanganan kasus menjadi lebih cepat dan komprehensif.

Selanjutnya sasaran meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan mencapai target sebesar 80% atau 100% dari target yang ditetapkan. Lembaga kemasyarakatan telah berperan aktif dalam kegiatan pemberdayaan keluarga, kegiatan sosial masyarakat, serta dukungan terhadap percepatan penurunan stunting di tingkat kelurahan.

a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

N O	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
			JUMLAH (Rp)	REALISASI (Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	71.710.000	68.547.000	95,59	136	4,41
2	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	30.728.000	30.378.000	98,86	140,28	1,14
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	11.130.000	11.080.000	99,55	100	0,45

N O	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
			JUMLAH (Rp)	REALISASI (Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	226.360.100	198.092.600	87,51	100	12,49
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	795.659.600	653.637.600	82,15	100	17,85
3	Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan dalam Pembangunan	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	160.008.200	157.577.200	98,48	100	1,52
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.556.249.750	1.506.528.240	96,81	100	3,19
4	Menurunnya Angka Kelahiran Total	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	352.600.000	341.746.290	96,92	111,76	3,08
5	Menurunnya kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.853.523.716	1.643.370.923	88,66	83,06	11,34
6	Meningkatnya pendampingan Keluarga Beresiko Stunting oleh TPK	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	762.826.400	752.349.100	98,63	59,89	
						99,38	1,37
						101,85	

Berdasarkan perbandingan antara jumlah anggaran, realisasi anggaran, capaian kinerja, serta keterkaitan antara sasaran dan program, penggunaan sumber daya perangkat daerah secara umum menunjukkan tingkat efisiensi yang sangat baik.

Pada sasaran meningkatnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan yang didukung Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, anggaran sebesar Rp71.710.000 direalisasikan Rp68.547.000 atau 95,59 persen dengan capaian kinerja 136 persen, sehingga terdapat efisiensi sebesar 4,41 persen. Hal ini menunjukkan kegiatan mampu menghasilkan dampak yang lebih besar dibandingkan biaya yang digunakan.

Pada sasaran meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak yang didukung beberapa program, terlihat efisiensi yang konsisten. Program Perlindungan Perempuan dengan anggaran Rp30.728.000

teralisasi Rp30.378.000 atau 98,86 persen menghasilkan capaian 140,28 persen. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak dengan anggaran Rp11.130.000 teralisasi Rp11.080.000 atau 99,55 persen mencapai kinerja 100 persen. Program Pemenuhan Hak Anak dengan anggaran Rp226.360.100 teralisasi Rp198.092.600 atau 87,51 persen mencapai kinerja 100 persen dengan efisiensi 12,49 persen. Program Perlindungan Khusus Anak dengan anggaran Rp795.659.600 teralisasi Rp653.637.600 atau 82,15 persen juga mencapai kinerja 100 persen dengan efisiensi terbesar yaitu 17,85 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa sasaran perlindungan perempuan dan anak dapat dicapai secara optimal melalui pemanfaatan sumber daya yang ekonomis.

Pada sasaran meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan, Program Administrasi Pemerintahan Desa memiliki anggaran Rp160.008.200 dengan realisasi Rp157.577.200 atau 98,48 persen dan capaian 100 persen. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dengan anggaran Rp1.556.249.750 teralisasi Rp1.506.528.240 atau 96,81 persen juga mencapai kinerja 100 persen dengan efisiensi 3,19 persen. Hal ini menunjukkan penguatan kelembagaan masyarakat dapat dicapai tanpa harus menghabiskan seluruh anggaran.

Pada sasaran menurunnya angka kelahiran total melalui Program Pengendalian Penduduk, anggaran Rp352.600.000 direalisasikan Rp341.746.290 atau 96,92 persen dengan capaian kinerja 111,76 persen, menghasilkan efisiensi 3,08 persen. Artinya intervensi pengendalian penduduk berjalan efektif dan berdampak lebih besar dari biaya yang dikeluarkan.

Pada sasaran menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi melalui Program Pembinaan Keluarga Berencana, anggaran Rp1.853.523.716 teralisasi Rp1.643.370.923 atau 88,66 persen dengan capaian kinerja 83,06 persen dan efisiensi 11,34 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa sisa anggaran tidak sepenuhnya menggambarkan efisiensi, tetapi juga dipengaruhi oleh kendala pelaksanaan di lapangan seperti partisipasi pasangan usia subur, akses pelayanan, maupun faktor sosial budaya.

Pada sasaran meningkatnya pendampingan keluarga berisiko stunting oleh TPK melalui Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera, anggaran Rp762.826.400 direalisasikan Rp752.349.100 atau 98,63 persen dengan capaian kinerja 99,38 persen dan efisiensi 1,37 persen, menunjukkan kegiatan berjalan sesuai rencana dengan penggunaan anggaran yang hemat.

b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	2025			Keterangan
			Target	Realisasi	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	15	20,44	136	Realisasi Indikator Program 20,44%, melampaui target sebesar 15%. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 136%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
2.1	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang memiliki perencanaan penganggaran responsif gender (pprg) dan anggaran responsif gender (arg)	100	100	100	Realisasi Indikator Kegiatan 100%, sama dengan target 100%. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
2.1 .1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	2	2	100	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 2 dokumen, sama dengan target 2 dokumen. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
2.1 .2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	2	2	100	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 2 dokumen, sama dengan target 2 dokumen. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
2.1 .3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	25	25	100	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 25 orang, sama dengan target 25 orang. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	2025			Keterangan
			Target	Realisasi	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
2.2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	100	100	100	Realisasi Indikator Kegiatan 100%, sama dengan target 100%. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
2.2 .1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	35	35	100	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 35 orang, sama dengan target 35 orang. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	7,2	4,3	140,28	Realisasi Indikator Program 4,3%, melampaui target sebesar 7,2%. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 140,28%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
3.1	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan rujukan lanjutan	100	100	100	Realisasi Indikator Kegiatan 100%, sama dengan target 100%. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
3.1 .1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	40	40	100	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 40 orang, sama dengan target 40 orang. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
3.2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan Penguatan dan Pengembangan	100	100	100	Realisasi Indikator Kegiatan 100%, sama dengan target 100%. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
3.2 .1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	100	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 1 dokumen, sama dengan target 1 dokumen. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	2025			Keterangan
			Target	Realisasi	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
3.2 .2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	30	30	100	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 30 orang, sama dengan target 30 orang. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase keterlibatan stakeholder dalam pemutakhiran data Gender dan Anak	100	100	100	Realisasi Indikator Program 100%, sama dengan target sebesar 100%. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
4.1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Gender dan Anak yang Update	100	100	100	Realisasi Indikator Kegiatan 100%, sama dengan target 100%. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
4.1 .1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	2	2	100	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 2 dokumen, sama dengan target 2 dokumen. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
5	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Forum Anak Daerah Aktif	100	100	100	Realisasi Indikator Program 100%, sama dengan target sebesar 100%. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
5.1	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Hak Anak Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha	100	100	100	Realisasi Indikator Kegiatan 100%, sama dengan target 100%. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
5.1 .1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	30	30	100	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 30 organisasi, sama dengan target 30 organisasi. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	2025			Keterangan
			Target	Realisasi	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.1 .2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	100	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 1 dokumen, sama dengan target 1 dokumen. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
5.2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang mendapatkan Penguatan dan Pengembangan Lembaga	85	80	94,12	Realisasi Indikator Kegiatan 80%, sedikit dibawah target sebesar 85%. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 94,12%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Berhasil"
5.2 .1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	250	54	178,40	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 54 orang, jauh dibawah target 250 orang. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 178,40%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
5.2 .2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2	2	100	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 2 dokumen, sama dengan target 2 dokumen. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
6	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Pendampingan	100	100	100	Realisasi Indikator Program 100%, sama dengan target sebesar 100%. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
6.1	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Anak yang mendapatkan Perlindungan Khusus yang memerlukan koordinasi	100	100	100	Realisasi Indikator Kegiatan 100%, sama dengan target 100%. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
6.1 .1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	250	48	19,2	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 54 orang, jauh dibawah target 250 orang. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 178,40%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	2025			Keterangan
			Target	Realisasi	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
6.1 .2	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	250	48	19,2	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 54 orang, jauh dibawah target 250 orang. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 178,40%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
6.2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Anak yang mendapatkan Perlindungan Khusus yang memerlukan koordinasi	95	95	100	Realisasi Indikator Kegiatan 95%, sama dengan target 95%. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
6.2 .1	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	2	2	100	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 2 kegiatan, sama dengan target 2 kegiatan. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
6.2 .2	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	2	0	0	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 0 orang, dibawah target sebesar 2 orang. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 0%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Tidak Berhasil"
7	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kelurahan dengan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100	100	100	Realisasi Indikator Program 100%, sama dengan target sebesar 100%. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
7.1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Kelurahan yang mendapatkan Pembinaan dalam rangka Lomba Kelurahan	100	100	100	Realisasi Indikator Kegiatan 100%, sama dengan target 100%. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
7.1 .1	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2	2	100	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 2 dokumen, sama dengan target 2 dokumen. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
8	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan yang mendapatkan penguatan/pemberdayaan	70	70	100	Realisasi Indikator Program 70%, sama dengan target sebesar 70%. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	2025			Keterangan
			Target	Realisasi	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
8.1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Kelurahan Tingkat Kota	60	57	95	Realisasi Indikator Kegiatan 57%, sedikit dibawah target sebesar 60%. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 90%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Berhasil"
8.1 .1	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1	1	100	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 1 dokumen, sama dengan target 1 dokumen. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
8.1 .2	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	36	36	100	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 36 lembaga, sama dengan target 36 lembaga. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
8.1 .3	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	36	36	100	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 36 lembaga, sama dengan target 36 lembaga. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
8.1 .4	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1	1	100	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 1 laporan, sama dengan target 1 laporan. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	2025			Keterangan
			Target	Realisasi	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
8.1 .5	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1	1	100	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 1 dokumen, sama dengan target 1 dokumen. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
9	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	17	15	111,76	Realisasi Indikator Program 15%, melampaui target sebesar 17%. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 111,76%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
9.1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah kelompok kerja KKBPK yang efektif	1	1	100	Realisasi Indikator Kegiatan 1 kelompok, sedikit dibawah target sebesar 1 kelompok. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 90%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Berhasil"
9.1 .1	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1	1	100	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 1 dokumen, sama dengan target 1 dokumen. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
9.1 .2	Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	30	30	100	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 30 organisasi, sama dengan target 30 organisasi. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
9.1 .3	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	4	4	100	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 4 laporan, sama dengan target 4 laporan. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
9.2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100	100	100	Realisasi Indikator Kegiatan 100%, sama dengan target 100%. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	2025			Keterangan
			Target	Realisasi	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
9.2 .1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	4	4	100	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 4 laporan, sama dengan target 4 laporan. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
9.2 .2	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1	1	100	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 1 dokumen, sama dengan target 1 dokumen. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
9.2 .3	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	4	4	100	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 4 laporan, sama dengan target 4 laporan. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
9.2 .4	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	4	4	100	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 4 dokumen, sama dengan target 4 dokumen. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
9.2 .5	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	2	2	100	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 2 dokumen, sama dengan target 2 dokumen. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
10	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	70,8	58,81	83,06	Realisasi Indikator Program 58,81%, dibawah target sebesar 70,8%. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 83,06%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Berhasil"
		Persentase Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Pasca Persalinan	71,8	43	59,89	Realisasi Indikator Program 43%, dibawah target sebesar 71,8%. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 59,89%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Tidak Berhasil"
10. 1	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	100	100	100	Realisasi Indikator Kegiatan 100%, sama dengan target 100%. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	2025			Keterangan
			Target	Realisasi	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
	dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal					100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
10.1.1	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	4	4	100	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 4 laporan, sama dengan target 4 laporan. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
10.1.2	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	4	4	100	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 4 laporan, sama dengan target 4 laporan. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
10.1.3	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	3	3	100	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 3 dokumen, sama dengan target 3 dokumen. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
10.1.4	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	16	16	100	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 16 organisasi, sama dengan target 16 organisasi. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
10.2	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase pelaksanaan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	100	100	100	Realisasi Indikator Kegiatan 100%, sama dengan target 100%. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
10.2.1	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	580	580	100	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 580 orang, sama dengan target 580 orang. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	2025			Keterangan
			Target	Realisasi	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
10.3	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan	100	100	100	Realisasi Indikator Kegiatan 100%, sama dengan target 100%. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
10.3.1	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	706	1639	232,15	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 1639 orang, sama dengan target 706 orang. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 232,15%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
10.3.2	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	2	2	100	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 2 laporan, sama dengan target 2 laporan. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
10.3.3	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	90	60	67	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 90 orang, sama dengan target 90 orang. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
10.4	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase pelaksanaan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	100	100	100	Realisasi Indikator Kegiatan 100%, sama dengan target 100%. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
10.4.1	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	11	11	100	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 11 kampung kb, sama dengan target 11 kampung kb. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
11	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	22,56	22,7	99,38	Realisasi Indikator Program 22,7%, sedikit dibawah target sebesar 22,56%. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 99,38%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	2025			Keterangan
			Target	Realisasi	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kota Pontianak	62	63,15	101,85	Realisasi Indikator Program 63,15%, tercapai diatas target sebesar 62%. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 101,85%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
11. 1	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang aktif	100	100	100	Realisasi Indikator Kegiatan 100%, sama dengan target 100%. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
11. 1.1	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	4	4	100	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 4 laporan, sama dengan target 4 laporan. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
11. 1.2	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	50	50	100	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 50 orang, sama dengan target 50 orang. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
11. 2	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase kelompok kelompok TPK yang aktif dalam melakukan pendampingan kepada keluarga beresiko stunting	100	100	100	Realisasi Indikator Kegiatan 100%, sama dengan target 100%. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
11. 2.1	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	10	10	100	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 10 dokumen, sama dengan target 10 dokumen. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	2025			Keterangan
			Target	Realisasi	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
11.2.2	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	10	10	100	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 10 dokumen, sama dengan target 10 dokumen. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"

Berdasarkan keterkaitan antara program, kegiatan, dan sub kegiatan terhadap indikator kinerja tahun 2025, sebagian besar pernyataan kinerja berhasil dicapai karena didukung oleh aktivitas operasional yang konsisten, terstruktur, dan menyasar langsung indikator output maupun outcome.

Pada Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, capaian indikator persentase ARG pada belanja langsung APBD sebesar 20,44% (136% dari target 15%) didukung oleh kegiatan pelembagaan PUG di OPD yang mencapai 100%, termasuk koordinasi perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan, serta advokasi dan pendampingan kepada 25 SDM. Kegiatan sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan pada organisasi kemasyarakatan yang terealisasi 100% juga memperkuat integrasi perencanaan responsif gender sehingga indikator program melampaui target.

Pada Program Perlindungan Perempuan, rasio kekerasan terhadap perempuan turun menjadi 4,3 per 100.000 penduduk perempuan (140,28% dari target 7,2). Keberhasilan ini ditopang oleh tersedianya layanan rujukan lanjutan bagi korban sebesar 100%, layanan pengaduan bagi 40 korban, serta penguatan lembaga layanan melalui peningkatan kapasitas 30 SDM dan penyediaan sarana prasarana. Artinya, indikator outcome berhasil karena layanan langsung kepada korban berjalan optimal dan sistem perlindungan berfungsi efektif.

Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak serta Program Pemenuhan Hak Anak juga menunjukkan keberhasilan karena seluruh komponen kegiatan mencapai 100%. Ketersediaan dua dokumen data gender dan anak yang mutakhir serta advokasi kepada 30 organisasi pemerintah dan non pemerintah memastikan forum anak aktif 100%. Walaupun pada kegiatan peningkatan kualitas hidup anak capaian lembaga hanya 80% dari target 85%

(94,12%), indikator program tetap tercapai karena koordinasi kelembagaan dan pendampingan berjalan konsisten.

Pada Program Perlindungan Khusus Anak, indikator anak korban kekerasan yang mendapatkan pendampingan mencapai 100% karena layanan pengaduan, koordinasi layanan, serta jejaring antar lembaga berjalan efektif. Namun terdapat kegagalan pada sub kegiatan peningkatan kapasitas SDM layanan (0 dari target 2 orang). Hal ini menunjukkan outcome tetap tercapai karena layanan langsung berjalan, tetapi penguatan kapasitas jangka panjang belum optimal.

Program Administrasi Pemerintahan Desa dan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan berhasil karena seluruh kegiatan pembinaan, evaluasi desa, peningkatan kapasitas lembaga, penyediaan sarana prasarana, serta fasilitasi PKK terlaksana 100%. Walaupun persentase pemberdayaan lembaga hanya 57% dari target 60% (95%), dukungan kegiatan yang merata membuat indikator program tetap tercapai.

Program Pengendalian Penduduk berhasil menurunkan ASFR 15-19 menjadi 15 (111,76% dari target 17) karena adanya dokumen Grand Design Kependudukan, advokasi kepada 30 organisasi, rapat pengendalian rutin, serta operasional rumah data kependudukan. Konsistensi pengelolaan data keluarga dan pelaporan lapangan menjadi faktor utama keberhasilan outcome demografis.

Sebaliknya, Program Pembinaan Keluarga Berencana menunjukkan capaian beragam. Indikator mCPR hanya mencapai 58,81% (83,06% dari target 70,8) dan KB pasca persalinan hanya 43% (59,89%) sehingga belum berhasil. Meskipun kegiatan advokasi, KIE, distribusi alat kontrasepsi, operasional balai penyuluhan, serta penggerakan 580 kader tercapai 100%, faktor perilaku masyarakat mempengaruhi outcome. Hal ini terlihat dari tingginya partisipasi MKJP (1639 orang atau 232,15%), namun belum berdampak langsung pada indikator cakupan KB total dan pasca persalinan. Artinya kegiatan output tercapai tetapi perubahan perilaku belum optimal.

Terakhir, Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera berhasil meningkatkan iBangga menjadi 63,15 (101,85%) dan MUKP 22,7 (99,38%). Keberhasilan ini didukung oleh aktivitas PPKS, pelatihan 50 kader, serta pendampingan keluarga berisiko stunting oleh TPK yang seluruhnya

mencapai 100%. Pendampingan langsung keluarga menjadi faktor dominan keberhasilan indikator kesejahteraan keluarga.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel III.3
Tabel Perbandingan Realisasi Serta Capaian Indikator Kinerja Sasaran di Tahun 2025 dengan Beberapa Tahun Sebelumnya

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025	2023	Realisasi 2024	2025
1	Meningkatnya pendampingan Keluarga Beresiko Stunting oleh TPK	Cakupan Keluarga Beresiko Stunting yang Memperoleh Pendampingan	92,00%	-	66,23%	78,48%
2	Menurunnya Angka Kelahiran Total	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate /TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	2,22%	2,06%	2,01%	2,2%
3	Menurunnya kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	8,8%	13,65%	12,49%	4,17%
4	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	Tingkat capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Utama	Madya	Utama	Utama
5	Meningkatnya Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Rasio Anak korban kekerasan	0,04%	0,01%	0,03%	0,02%
6	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	Persentase keterlibatan lembaga Kemasyarakatan dalam program pembangunan di wilayah kelurahan	80%	75%	85%	80%

Sumber : BPS DP2KBP3A Kota Pontianak 2024

Berdasarkan perbandingan realisasi indikator kinerja sasaran tahun 2025 dengan capaian tahun 2023 dan 2024, secara umum kinerja perangkat daerah menunjukkan tren perbaikan meskipun masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target.

Pada sasaran meningkatnya pendampingan keluarga berisiko stunting oleh TPK, indikator cakupan keluarga berisiko stunting yang memperoleh pendampingan ditargetkan sebesar 92,00 persen, namun realisasi tahun 2025 mencapai 78,48 persen. Capaian ini meningkat dibanding tahun 2024 sebesar 66,23 persen, sehingga menunjukkan adanya perbaikan kinerja pendampingan di lapangan. Meskipun demikian target belum tercapai karena keterbatasan jangkauan pendampingan dan dinamika keberadaan keluarga sasaran yang berubah.

Pada sasaran menurunnya angka kelahiran total, indikator Total Fertility Rate (TFR) ditargetkan 2,22 dan realisasi tahun 2025 sebesar 2,2. Angka ini sedikit meningkat dibanding tahun 2024 sebesar 2,01 namun masih lebih rendah dibanding

tahun 2023 sebesar 2,06. Kondisi tersebut menunjukkan pengendalian kelahiran relatif stabil dan tetap berada pada kisaran target, walaupun terdapat fluktuasi kecil yang dipengaruhi perilaku fertilitas pasangan usia subur.

Pada sasaran menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need), target tahun 2025 sebesar 8,8 persen dan realisasi mencapai 4,17 persen. Capaian ini jauh lebih baik dibanding tahun 2023 sebesar 13,65 persen dan tahun 2024 sebesar 12,49 persen, sehingga menunjukkan peningkatan akses dan pemanfaatan pelayanan KB yang signifikan.

Pada sasaran meningkatnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan, indikator tingkat capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tetap berada pada kategori Utama di tahun 2025, sama dengan tahun 2024 dan meningkat dibanding tahun 2023 yang berada pada kategori Madya. Hal ini menunjukkan konsistensi pelebagaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah.

Pada sasaran meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak, indikator rasio anak korban kekerasan ditargetkan 0,04 persen dan realisasi tahun 2025 sebesar 0,02 persen. Capaian ini lebih baik dibanding tahun 2024 sebesar 0,03 persen dan mendekati kondisi tahun 2023 sebesar 0,01 persen, yang menunjukkan efektivitas upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak.

Pada sasaran meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan, indikator keterlibatan lembaga kemasyarakatan ditargetkan 80 persen dan realisasi tahun 2025 mencapai 80 persen. Capaian ini menurun dibanding tahun 2024 sebesar 85 persen namun meningkat dibanding tahun 2023 sebesar 75 persen, sehingga dapat dikatakan partisipasi masyarakat relatif stabil dan sesuai target.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel III.4 menyajikan perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target Tahun 2025 serta target jangka menengah Renstra.

Tabel. III.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Tahun 2025 dan Target Jangka Menengah Renstra

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2025	Realisasi 2025	Target Renstra	%
1	Meningkatnya pendampingan Keluarga Beresiko Stunting oleh TPK	Cakupan Keluarga Beresiko Stunting yang Memperoleh Pendampingan	92,00%	78,48%	95%	
2	Menurunnya Angka Kelahiran Total Menurunnya kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate /TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	2,22%	2,2%	2,10%	
3	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	8,8%	4,17%	7,8%	
4	Meningkatnya Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Tingkat capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Utama	Utama	Mentor	
5	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	Rasio Anak korban kekerasan	0,04%	0,02%	0,02%	
6	Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan dalam Pembangunan	Persentase keterlibatan lembaga Kemasyarakatan dalam program pembangunan di wilayah kelurahan	80%	80%	85%	

Sumber : BPS DP2KBP3A Kota Pontianak 2024

Berdasarkan perbandingan antara target tahun 2025, realisasi tahun 2025, dan target jangka menengah Renstra pada Tabel III.4, kinerja perangkat daerah menunjukkan hasil yang bervariasi antara sasaran yang telah tercapai, melampaui target, maupun yang masih memerlukan penguatan intervensi program.

Pada tujuan **meningkatnya pendampingan keluarga berisiko stunting oleh TPK**, indikator cakupan keluarga berisiko stunting yang memperoleh pendampingan ditargetkan sebesar **92,00%**, namun realisasi hanya mencapai **78,48%** atau sekitar **85,30% dari target tahunan** dan masih berada di bawah target Renstra sebesar **95%**. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan.

Pada tujuan **menurunnya angka kelahiran total**, indikator Total Fertility Rate (TFR) ditargetkan **2,22**, dengan realisasi **2,20**, sehingga capaian kinerja mencapai sekitar **99,10% dari target tahunan** dan relatif mendekati target Renstra **2,10**. Hasil ini menunjukkan Program Pengendalian Penduduk dan Program Pembinaan Keluarga Berencana berjalan cukup efektif dalam mengendalikan fertilitas, meskipun masih diperlukan penguatan pelayanan kontrasepsi jangka panjang untuk mencapai target jangka menengah.

Selanjutnya pada tujuan **meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak** melalui indikator **unmet need KB**, target tahun 2025 sebesar **8,8%** berhasil ditekan menjadi **4,17%** atau sekitar **210,79% capaian kinerja**, sekaligus telah melampaui target Renstra **7,8%**. Capaian ini menggambarkan keberhasilan program pelayanan KB, peningkatan akses pelayanan, serta edukasi kepada pasangan usia

Pada tujuan perlindungan perempuan dan anak, indikator **rasio anak korban kekerasan** ditargetkan **0,04%** dan terealisasi **0,02%**, sehingga mencapai **200% dari target** serta telah memenuhi target Renstra **0,02%**.

Pada tujuan **meningkatnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan**, indikator capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) menargetkan kategori **Utama** dan berhasil dipertahankan pada kategori **Utama**, meskipun target Renstra adalah meningkat menjadi **Mentor**. Artinya Program Pengarusutamaan Gender telah berjalan baik namun masih membutuhkan inovasi kebijakan, penguatan kelembagaan, serta integrasi gender dalam perencanaan agar dapat naik ke tingkat lebih tinggi.

Terakhir pada tujuan **meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan**, indikator keterlibatan lembaga kemasyarakatan ditargetkan **80%** dan terealisasi **80%** atau **100% capaian kinerja**, namun masih di bawah target Renstra **85%**.

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Tabel. III.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Nasional

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi 2025	Target Nasional
1	Meningkatnya pendampingan Keluarga Beresiko Stunting oleh TPK	Cakupan Keluarga Beresiko Stunting yang Memperoleh Pendampingan	78,48%	90%
2	Menurunnya Angka Kelahiran Total Menurunnya kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate /TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	2,2%	2,1%
3	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	4,17%	7,40%
4	Meningkatnya Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Tingkat capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Utama	-
5	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	Rasio Anak korban kekerasan	0,02%	-
6	Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan dalam Pembangunan	Persentase keterlibatan lembaga Kemasyarakatan dalam program pembangunan di wilayah kelurahan	80%	-

Sumber : BPS DP2KBP3A Kota Pontianak 2024

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional pada Tabel III.5, terlihat bahwa sebagian indikator telah memenuhi bahkan melampaui standar nasional, sementara beberapa indikator lainnya masih memerlukan penguatan intervensi program.

Pada sasaran **meningkatnya pendampingan keluarga berisiko stunting oleh TPK**, cakupan keluarga berisiko stunting yang memperoleh pendampingan terealisasi sebesar **78,48%**, masih berada di bawah target nasional **90%**. Artinya capaian daerah baru sekitar **87,2% dari standar nasional**. Kondisi ini menunjukkan Program Percepatan Penurunan Stunting melalui Tim Pendamping Keluarga belum optimal, terutama pada aspek validasi sasaran, serta konsistensi pendampingan keluarga. Oleh karena itu peningkatan kapasitas kader, pemetaan sasaran yang lebih akurat, dan penguatan koordinasi lintas sektor menjadi kebutuhan utama.

Pada sasaran **menurunnya angka kelahiran total**, indikator Total Fertility Rate (TFR) terealisasi **2,20**, sedikit lebih tinggi dibanding target nasional **2,10**. Selisih ini relatif kecil namun menunjukkan pengendalian fertilitas masih perlu diperkuat. Program Pengendalian Penduduk dan Pembinaan Keluarga Berencana telah berjalan cukup efektif, tetapi peningkatan penggunaan kontrasepsi modern terutama metode kontrasepsi jangka panjang masih menjadi faktor penentu untuk mencapai standar nasional.

Sebaliknya pada indikator **unmet need KB**, realisasi sebesar **4,17%** jauh lebih baik dibanding target nasional **7,40%**. Hal ini berarti capaian daerah **lebih rendah 3,23 poin** dari batas nasional (semakin kecil semakin baik) dan menunjukkan keberhasilan Program Bangga Kencana, peningkatan akses pelayanan KB, serta edukasi kepada pasangan usia subur. Kinerja ini menunjukkan sistem pelayanan KB di Kota Pontianak telah berjalan efektif.

Untuk indikator **rasio anak korban kekerasan**, realisasi sebesar **0,02%** menunjukkan kondisi relatif terkendali. Namun secara nasional tidak terdapat standar angka baku yang seragam karena indikator perlindungan anak pada tingkat nasional umumnya diukur melalui tren penurunan kasus, cakupan layanan, dan keberadaan sistem perlindungan anak, bukan angka prevalensi tunggal.

Pada indikator **tingkat capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)** dengan kategori **Utama**, juga tidak memiliki target angka nasional karena merupakan indikator penghargaan berbasis penilaian kualitatif terhadap implementasi pengarusutamaan gender. Secara nasional hanya terdapat jenjang kategori (Pratama, Madya, Utama, Mentor). Posisi **Utama** menunjukkan Kota Pontianak telah memenuhi sebagian besar indikator kelembagaan dan implementasi gender, meskipun belum mencapai level tertinggi (Mentor).

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tabel. III.6
Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi yang Dilakukan	Rekomendasi/ Rencana Tindak Lanjut
1	Meningkatnya pendampingan Keluarga Beresiko Stunting oleh TPK	Cakupan Keluarga Beresiko Stunting yang Memperoleh Pendampingan	a) Data keluarga berisiko stunting bersifat dinamis sehingga sasaran sering berubah. b) Mobilitas keluarga sasaran tinggi sehingga sulit ditemui. c) Beban kerja kader cukup tinggi dan jumlah kader terbatas.	a) Penguatan koordinasi lintas sektor di tingkat kelurahan. b) Peningkatan kapasitas kader melalui pembinaan dan pelatihan. c) Pemanfaatan aplikasi pendataan untuk monitoring kunjungan.	a) Rencana penguatan insentif kader dan fleksibilitas jadwal kunjungan. b) Integrasi pendampingan dengan pelayanan kesehatan dan posyandu.
2	Menurunnya Angka Kelahiran Total Menurunnya kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate /TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	a) Akses pelayanan KB semakin mudah dijangkau masyarakat. b) Fasilitas pelayanan kesehatan cukup memadai.		a) Meningkatkan Promosi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). b) Meningkatkan Konseling pranikah dan pascapersalinan
3	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	a) Ketersediaan alat kontrasepsi terjamin b) Pelayanan KB gratis dan terjangkau. c) Peran penyuluh KB semakin aktif.		a) Menjaga distribusi logistik kontrasepsi. b) Meningkatkan KB pascapersalinan. c) Peningkatan konseling individu pasangan usia subur.
4	Meningkatnya Peran Serta dan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan	Tingkat capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	a) Adanya komitmen pemerintah daerah terhadap pengarusutamaan gender. b) Tersedianya data terpilah gender. c) Integrasi perspektif gender dalam perencanaan perangkat daerah.		a) Meningkatkan Pelatihan Perencanaan Responsif Gender (PPRG). b) Meningkatkan Pendampingan kepada perangkat daerah dalam penerapan PPRG c) Melakukan Monitoring dan evaluasi implementasi PUG.

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi yang Dilakukan	Rekomendasi/ Rencana Tindak Lanjut
5	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	Rasio Anak korban kekerasan	a) Peningkatan sosialisasi pencegahan kekerasan. b) Tersedianya layanan pengaduan dan pendampingan korban. c) Koordinasi dengan kepolisian, sekolah, dan masyarakat.		a) Penguatan edukasi keluarga dan sekolah ramah anak. b) Peningkatan kapasitas SDM Penyedia Layanan Perlindungan Anak c) Mempercepat implementasi pembentukan UPTD PPA
6	Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan dalam Pembangunan	Persentase keterlibatan lembaga kemasyarakatan dalam program pembangunan di wilayah kelurahan	a) Lembaga kemasyarakatan aktif di tingkat kelurahan. b) Adanya Dukungan pembinaan dan fasilitasi pemerintah daerah. c) Lembaga kemasyarakatan terlibat aktif dalam perencanaan pembangunan daerah		a) Melakukan Pembinaan kelembagaan dan pelatihan manajemen organisasi.

Berdasarkan perbandingan target dan realisasi indikator tujuan tahun 2025, dapat dianalisis faktor penyebab keberhasilan maupun belum tercapainya kinerja serta alternatif solusi yang telah dan perlu dilakukan sebagai berikut.

Pada tujuan **meningkatnya pendampingan keluarga berisiko stunting oleh TPK**, target cakupan pendampingan sebesar 92,00% namun realisasi hanya 78,48%. Ketidaktercapaian ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain perubahan data sasaran keluarga berisiko stunting yang dinamis, keterbatasan intensitas kunjungan Tim Pendamping Keluarga, beban kerja kader yang tinggi, serta masih adanya keluarga sasaran yang sulit ditemui karena mobilitas tinggi. Selain itu kesadaran sebagian keluarga terhadap pentingnya pendampingan masih rendah. Alternatif solusi yang telah dilakukan adalah pemutakhiran data keluarga berisiko stunting secara berkala, penguatan koordinasi lintas sektor di tingkat kelurahan, peningkatan kapasitas kader melalui pembinaan, serta pemanfaatan aplikasi pendataan untuk memantau kunjungan. Ke depan diperlukan penguatan insentif kader, penjadwalan kunjungan yang lebih fleksibel, serta integrasi kegiatan dengan pelayanan kesehatan agar sasaran lebih mudah dijangkau.

Pada tujuan **menurunnya angka kelahiran total**, indikator TFR ditargetkan 2,22 dan terealisasi 2,2 sehingga pada prinsipnya target tercapai. Keberhasilan ini

dipengaruhi oleh meningkatnya akses pelayanan KB, keberadaan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai, serta intensifikasi penyuluhan kepada pasangan usia subur. Namun fluktuasi fertilitas masih terjadi karena adanya preferensi jumlah anak pada sebagian masyarakat dan penggunaan kontrasepsi non jangka panjang. Upaya yang dilakukan adalah peningkatan promosi kontrasepsi modern khususnya MKJP, pelayanan KB serentak, serta konseling pranikah dan pascapersalinan.

Pada tujuan **menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)**, target 8,8% berhasil dilampaui dengan realisasi 4,17%. Keberhasilan ini disebabkan oleh ketersediaan alat kontrasepsi, pelayanan KB gratis, peningkatan peran penyuluh KB, serta edukasi kepada pasangan usia subur. Selain itu integrasi pelayanan KB dengan pelayanan kesehatan ibu dan anak juga meningkatkan cakupan pelayanan. Upaya yang terus dilakukan adalah menjaga ketersediaan logistik kontrasepsi, memperluas pelayanan KB pascapersalinan, serta meningkatkan konseling individu.

Pada tujuan **meningkatnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan**, capaian Anugerah Parahita Ekapraya berada pada kategori Utama sesuai target. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh komitmen pemerintah daerah dalam pengarusutamaan gender, tersedianya data terpilah, serta integrasi perspektif gender dalam perencanaan perangkat daerah. Upaya yang dilakukan antara lain pelatihan perencanaan responsif gender, pendampingan perangkat daerah, serta monitoring evaluasi pelaksanaan PUG. Ke depan diperlukan penguatan implementasi agar dapat meningkat ke kategori lebih tinggi.

Pada tujuan **meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak**, rasio anak korban kekerasan terealisasi 0,02% lebih baik dari target 0,04%. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya upaya pencegahan, sosialisasi, serta keberadaan layanan pengaduan dan pendampingan korban. Selain itu koordinasi dengan kepolisian, sekolah, dan masyarakat membantu deteksi dini kasus. Upaya lanjutan yang dilakukan adalah penguatan edukasi keluarga, peningkatan kapasitas petugas layanan, serta pengembangan sistem pelaporan berbasis masyarakat.

Pada tujuan **meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan**, target 80% tercapai sebesar 80%. Capaian ini dipengaruhi oleh aktifnya lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan serta dukungan pemerintah melalui pembinaan dan fasilitasi kegiatan masyarakat. Namun partisipasi belum meningkat signifikan karena keterbatasan kapasitas kelembagaan dan

ketergantungan pada dukungan pemerintah. Upaya yang telah dilakukan adalah pembinaan kelembagaan, pelatihan manajemen organisasi, serta pelibatan lembaga dalam perencanaan pembangunan. Ke depan diperlukan penguatan kemandirian lembaga, peningkatan kolaborasi, dan pemberian ruang partisipasi yang lebih luas.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dapat dilihat pada table dibawah ini ;

No	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	71.710.000	68.547.000	95,59
2	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	30.728.000	30.378.000	98,86
3	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	11.130.000	11.080.000	99,55
4	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	226.360.100	198.092.600	87,51
5	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	795.659.600	653.637.600	82,15
6	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	160.008.200	157.577.200	98,48
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.556.249.750	1.506.528.240	96,81
8	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	352.600.000	341.746.290	96,92
9	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.853.523.716	1.643.370.923	88,66
10	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	762.826.400	752.349.100	98,63
11	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	8.235.719.081	7.192.561.251	87,33
12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.235.719.081	7.192.561.251	87,33

Berdasarkan data realisasi anggaran tahun 2025, secara umum pelaksanaan program sudah berjalan cukup baik. Hampir seluruh program memiliki tingkat serapan di atas 90 persen, bahkan beberapa mendekati 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan relatif selaras dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Program dengan serapan tertinggi terdapat pada Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak yang terealisasi 99,55 persen, kemudian Program Perlindungan Perempuan sebesar 98,86 persen, Program Administrasi Pemerintahan Desa sebesar 98,48 persen, serta Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera sebesar 98,63 persen. Tingginya realisasi ini menggambarkan bahwa kegiatan dapat dilaksanakan sesuai rencana tanpa kendala berarti, baik dari sisi teknis maupun administrasi.

Untuk program dengan pagu anggaran cukup besar seperti Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang terealisasi 96,81 persen dan Program Pengendalian Penduduk sebesar 96,92 persen, capaian tersebut juga menunjukkan pengelolaan anggaran yang cukup efektif. Artinya, kegiatan yang bersifat pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat tetap dapat berjalan optimal dengan tingkat serapan yang baik.

Di sisi lain, terdapat beberapa program dengan serapan di bawah 90 persen, seperti Program Perlindungan Khusus Anak (82,15 persen), Program Pemenuhan Hak Anak (87,51 persen), dan Program Pembinaan Keluarga Berencana (88,66 persen). Sisa anggaran pada program-program tersebut kemungkinan disebabkan oleh efisiensi pelaksanaan kegiatan, penyesuaian kebutuhan riil di lapangan, atau adanya kegiatan yang volumenya tidak sepenuhnya terealisasi sesuai perencanaan awal.

Sementara itu, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terealisasi sebesar 87,33 persen. Angka ini menunjukkan fungsi pendukung seperti administrasi perkantoran, perencanaan, dan pengelolaan keuangan tetap berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat ruang untuk optimalisasi serapan anggaran.

Secara keseluruhan, realisasi anggaran tahun 2025 dapat dikatakan cukup baik dan mendukung pencapaian kinerja organisasi. Sisa anggaran yang ada lebih mencerminkan adanya efisiensi dan penyesuaian pelaksanaan kegiatan di lapangan, bukan karena program tidak berjalan.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa dari 2 (dua) Tujuan dan 6 (enam) sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak Tahun 2025, diukur melalui 11 (sebelas) indikator utama, seperti terlihat dalam table dibawah :

Tabel IV.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak Tahun 2025

No	Indikator Tujuan dan Sasaran Strategis	Target	Realisasi	%
1	Tujuan 1. PD :			
	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk			
	Laju pertumbuhan penduduk	0,93%	1,06%	-13,05%
2	Tujuan 2. PD :			
	Meningkatnya Peran Perempuan dan Perlindungan Anak			
	Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak	94,3%	94,80%	100,53%
	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Nindya	Nindya	100%
1	Sasaran 1: Meningkatkan pendampingan Keluarga Beresiko Stunting oleh TPK			
	Cakupan Keluarga Beresiko Stunting yang Memperoleh Pendampingan	92,00%	78,48%	85,30%
2	Sasaran 2 : Menurunnya Angka Kelahiran Total			
	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate /TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	2,22%	2,2%	100%
3	Sasaran 3 : Menurunnya kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi			
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	8,8%	4,17%	152,61%
4	Sasaran 4 : Meningkatkan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan			

No	Indikator Tujuan dan Sasaran Strategis	Target	Realisasi	%
	Tingkat capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Utama	Utama	Utama
5	Sasaran 5 : Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak			
	Rasio anak korban kekerasan	0,04%	0,02%	150%
6	Sasaran 6 : Meningkatnya Peran Lembaga Masyarakat dalam Pembangunan			
	Persentase keterlibatan lembaga Masyarakat dalam program pembangunan di wilayah kelurahan	80%	80%	100%

Berdasarkan Tabel IV.1 tentang Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025, secara umum kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan hasil yang baik, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang perlu menjadi perhatian.

Pada level tujuan perangkat daerah, untuk Tujuan 1 yaitu terkendalinya pertumbuhan penduduk, indikator laju pertumbuhan penduduk ditargetkan sebesar 0,93%, namun realisasinya mencapai 1,06% atau minus 13,05% dari target. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk masih sedikit lebih tinggi dari yang direncanakan.

Sementara itu, pada Tujuan 2 yaitu meningkatnya peran perempuan dan perlindungan anak, capaian menunjukkan hasil yang sangat baik. Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak terealisasi sebesar 94,80% dari target 94,3% atau mencapai 100,53%. Ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas pembangunan yang responsif gender. Tingkat Capaian Kota Layak Anak juga berhasil dipertahankan pada kategori Nindya sesuai target, yang menandakan komitmen daerah dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak tetap konsisten.

Pada tingkat sasaran strategis, sebagian besar indikator menunjukkan capaian optimal. Sasaran menurunnya angka kelahiran total (TFR) tercapai sesuai target dengan realisasi 2,2 dari target 2,22 atau 100%. Sasaran menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi bahkan melampaui target, dengan realisasi 4,17% dari target 8,8% atau 152,61%. Capaian ini menunjukkan efektivitas pelayanan KB serta meningkatnya akses dan kesadaran masyarakat.

Sasaran perlindungan terhadap perempuan dan anak juga menunjukkan kinerja yang sangat baik, dimana rasio anak korban kekerasan terealisasi 0,02% dari target 0,04% atau 150%. Artinya, upaya pencegahan dan penanganan kasus berjalan efektif. Sasaran peningkatan peran lembaga kemasyarakatan juga tercapai 100% sesuai target 80%, yang menunjukkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan tetap terjaga.

Namun demikian, sasaran meningkatnya pendampingan keluarga berisiko stunting oleh TPK belum sepenuhnya tercapai. Dari target 92%, realisasi hanya 78,48% atau 85,30%. Hal ini menjadi area yang perlu diperkuat, mengingat isu stunting merupakan prioritas nasional dan sangat menentukan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Secara keseluruhan, capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 menunjukkan bahwa mayoritas tujuan dan sasaran strategis telah tercapai bahkan melampaui target, khususnya pada bidang keluarga berencana, kesetaraan gender, dan perlindungan anak. Tantangan utama ke depan terletak pada pengendalian pertumbuhan penduduk dan peningkatan cakupan pendampingan keluarga berisiko stunting agar kinerja pembangunan semakin seimbang dan berkelanjutan.

Kebijakan pokok dan kebijakan strategis serta kebijakan yang dilakukan diharapkan akan mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak yang sudah ditetapkan dalam dokumen RPD Kota Pontianak Tahun dan Renstra DP2KBP3A Kota Pontianak Tahun 2024-2026 serta pencapaian Visi Kota Pontianak “**Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan Terdepan di Kalimantan Tahun 2025**”.

Pontianak, Januari 2025

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA PONTIANAK**



dr. Rifka, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19740303 200212 2 006